Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 02 Agustus (2025), pp. 72-84
ISSN:2775-6513

PENGARUH PDRB DAN PENGANGGURAN TERHADAP IPM MELALUI KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rahmat Nur Naim[1], Mustofa Umar[2]
Email: rahmatnurnaim93@gmail.com

[1,2] Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and unemployment rate on the Human Development Index (HDI) in South Sulawesi Province, with poverty rate as an intervening variable. The data used is time series data from 2009 to 2023 obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis method employed is multiple linear regression and path analysis, using the EViews 12 software. The results show that GRDP has a negative and significant effect on poverty, while the unemployment rate has a positive and significant effect on poverty. Furthermore, GRDP also has a positive and significant effect on HDI, while the unemployment rate and poverty do not have a significant effect on HDI. The indirect effects of GRDP and unemployment on HDI through poverty are also found to be insignificant. These findings indicate that economic growth alone is not sufficient to improve human development if not accompanied by a more equitable reduction in poverty and unemployment.

Keywords: GRDP, Unemployment, Poverty, Human Development Index

ARTICLE INFO

Received 28/07/2025
Accepted 08/09/2025
Online 11/09/2025

*Correspondence:
Rahmat Nur Naim[1]
E-mail:
rahmatnurnaim93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. Data yang digunakan merupakan data time series dari tahun 2009 hingga 2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan analisis jalur (path analysis) dengan bantuan program EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, PDRB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Adapun pengaruh tidak langsung PDRB dan pengangguran terhadap IPM melalui kemiskinan juga tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan pembangunan manusia jika tidak dibarengi dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran secara merata.

Kata Kunci: PDRB, Pengangguran, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

ICOR: Journal of Regional Economics
Vol. 06, No. 02 Agustus (2025). pp. 72-84

Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan proses tersebut. Namun, pembangunan tidak hanya soal peningkatan output ekonomi, melainkan juga soal bagaimana manusia sebagai pelaku utama pembangunan itu sendiri berkembang. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia menjadi tolak ukur penting karena manusia bukan hanya objek, tetapi juga subjek dari pembangunan itu sendiri (Idris, 2016).

United Nations Development Programme (UNDP) menekankan pentingnya pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketiganya kemudian diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang telah menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan suatu wilayah (UNDP, 2020; Baumann, 2021). Di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun angka IPM menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, disparitas antar daerah masih terlihat cukup mencolok. Ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPM secara tidak langsung, termasuk kondisi ekonomi dan sosial yang melingkupinya (Darwin Lie *et al.*, 2022).

Secara regulatif, arah kebijakan pembangunan manusia di Indonesia telah ditegaskan dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kedua aturan tersebut mendorong pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Ketiganya adalah komponen utama dari IPM, yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 IPM Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 71,66. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 71,93 pada tahun 2020, meskipun saat itu dunia menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang turut memengaruhi berbagai aspek pembangunan. Tren positif ini terus berlanjut, dengan IPM mencapai 72,24 pada tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana IPM meningkat menjadi 72,82. Tren ini memuncak pada tahun 2023 dengan pencapaian IPM sebesar 73,46. Namun, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di semua kabupaten/kota. Keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi hambatan bagi sebagian wilayah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercermin dalam PDRB menunjukkan pemulihan yang cukup stabil pasca-pandemi COVID-19, namun belum sepenuhnya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Menurut Todaro dan Smith (dalam Laode, Engka and Sumual, 2020), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi IPM. Peningkatan PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya PDRB mencerminkan kemampuan ekonomi daerah untuk mendukung pembangunan manusia secara lebih baik.

Selain itu, tingkat pengangguran juga memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan kurangnya kesempatan kerja yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Menurut Andhykha *et al.*, (2018) pengangguran tidak hanya memengaruhi pendapatan individu, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, yang pada akhirnya berpengaruh pada indikator-indikator pembangunan manusia. Di Sulawesi Selatan, data menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas masih menjadi isu

yang relevan. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana tingkat pengangguran memengaruhi IPM melalui variabel lain, seperti tingkat kemiskinan (Hidayah, 2024).

Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan sosial dan ketimpangan ekonomi dalam suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan masih berada di atas rata-rata nasional, meskipun terdapat tren penurunan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan IPM di provinsi ini (Hani & Imaningsih, 2024).

PDRB yang tinggi seharusnya mendorong peningkatan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya berkontribusi pada perbaikan IPM (Todaro & Smith, 2015). Namun, meskipun PDRB meningkat, tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi, sehingga pembangunan manusia tidak optimal. Hal ini diduga karena kemiskinan berperan sebagai variabel intervening yang melemahkan dampak positif PDRB terhadap IPM. Selain itu, tingginya pengangguran juga mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung menurunkan capaian IPM (Sen, 1999). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana PDRB dan pengangguran memengaruhi IPM dengan kemiskinan sebagai variabel intervening.

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menganalisis hubungan langsung antara PDRB atau tingkat pengangguran dengan IPM, tanpa mempertimbangkan peran variabel intervening, seperti tingkat kemiskinan. Padahal, memahami mekanisme hubungan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan membantu perumusan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB dan tingkat pengangguran terhadap IPM dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening di Provinsi Sulawesi Selatan.

Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda yang dipadukan dengan model analisis jalur (*path analysis*). Data yang digunakan berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), disusun dalam bentuk runtutan waktu (*time series*) selama 15 tahun, dari 2009-2023. Data tersebut mencakup produk domestik regional bruto (milliard rupiah), tingkat pengangguran terbuka (%), tingkat kemiskinan (%) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%).Dalam analisis regresi linear berganda, dilakukan pula uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Untuk menguji peran variabel intervening, digunakan uji Sobel.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Dalam penelitian ini terdapat 2 model persamaan regresi yang akan kita uji yaitu:

Persamaan 1 : $Z = \alpha 0 + \alpha 1x1 + \alpha 2x2 + e1$

Persamaan 2 : $Y = \beta 0 + \beta 1x1 + \beta 2x2 + z + e2$

Dimana:

Y	: Indek Pembangunan Manusia
Z	: Kemiskinan
$X1$	: PDRB
$X2$	: Tingkat Pengangguran
$\alpha 1, \alpha 2, \alpha 3, \beta 1, \beta 2, \beta 3$	: Koefisien Regresi
$\alpha 0, \beta 0$	: Konstanta
$\varepsilon 1, \varepsilon 2$	: Eror Term

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengecek apakah variabel independen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan uji Jarque-Bera, dengan membandingkan nilai Probabilitas J-B (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila nilai Prob. J-B hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai prob. J-B hitung lebih kecil dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Probability
0.672397	0.714481

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.71 > 0.05, sehingga data terdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi dan model layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

b) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi linear yang kuat antara variabel-variabel independen dalam sebuah model regresi. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan memeriksa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dikatakan mengalami multikolinearitas tinggi jika nilai VIF-nya melebihi 10. Nilai VIF yang ideal adalah mendekati 1, karena hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas atau korelasi yang signifikan antar variabel independen.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

VIF (X1)	VIF (X2)
2.103110	2.103110

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Hasil perhitungan VIF pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki nilai VIF sebesar 2.103110. Dengan seluruh nilai di bawah batas toleransi 10, model regresi ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians pada residual antar pengamatan atau tidak.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-Statistic	1.544225	Prob. F(5,9)	
Obs*R-squared	6.926382	Prob. Chil-Square(5)	0.2262
Scaled explained SS	2.257933	Prob. Chil-Square(5)	

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Hasil Uji Heteroskedastisitas dalam Tabel 9 menunjukkan nilai Probabilitas Chil- Square sebesar 0.2262, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara error (gangguan) pada periode *t* dan periode sebelumnya (*t-1*) dalam model regresi linear. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.833432	Prob. F (2,10)	0.2097
Obs*R-squared	4.024549	Prob. Chi-Square (2)	0.1337

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Hasil Uji Autokorelasi dalam Tabel 10 menunjukkan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,1337, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung autokorelasi.

2. Uji Regresi Linear Berganda

a) Model 1

Hasil regresi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X1) dan Tingkat Pengangguran (X2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Z) sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda Model 1

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	9.308243	0.872575	10.66756	0.0000
X1	-3.75E-06	8.34E-07	-4.494076	0.0007
X2	0.294270	0.105412	2.791626	0.0163

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

$Z = 9.308243 - 3.75E\text{-}06X1 + 0.294270X2 + e$

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 5 adapun model persamaan regresi yang diperoleh dan dibentuk sebagai berikut:

- Nilai Konstanta 9.308243 menunjukkan bahwa apabila variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) dan tingkat pengangguran (X2) berada dalam kondisi tetap (konstan), maka tingkat kemiskinan (Z) diperkirakan sebesar 9.308243.
- Nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) sebesar -3.75 yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara PDRB dan kemiskinan. Hal ini berarti setiap peningkatan pada PDRB akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3.75.
- Nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran (X2) sebesar 0.29 menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berarti setiap peningkatan pada tingkat pengangguran akan berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0.29.

i) Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 rendah atau mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang sangat terbatas dalam menerangkan perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu, artinya variabel independen mampu memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uj Koefisien Determinasi (R^2) Model 1

R-squared	0.889993
Adjustes R-squared	0.871658

Sumber: *Eviews 12 data diolah, 2025*

Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) dalam Tabel 6 memperlihatkan nilai R-squared sebesar 0,889993 (89%). Hal ini menunjukkan bahwa 89% variasi dalam variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB dan Tingkat Pengangguran, sisanya 11% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

ii) Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel PDRB dan Pengangguran secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Jika nilai Sig. < 0,05, berarti hipotesis diterima. Sebaliknya, jika Sig. > 0,05, hipotesis ditolak.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji t) Model 1

F-statistic	**48.54191**
Prob(F-Statistic)	0.000002

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 7, hasil Uji Simultan (Uji F) menunjukkan nilai 0,000002 < 0,05, yang berarti variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

iii) Uji Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *prob-t statistik* dengan tingkat signifikansi (α = 0,05). Jika nilai signifikansi suatu variabel > 0,05, berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t) Model 1

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	9.308243	0.872575	10.66756	0.0000
X1	-3.75E-06	8.34E-07	-4.494076	0.0007
X2	0.294270	0.105412	2.791626	0.0163

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa variabel PDRB (X1) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.000 > 0.05 dan nilai thitung 4.494 < ttabel 2.201. Dengan demikian, variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, H_o ditolak dan H_1 diterima. Sementara itu, Pengangguran (X2) juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.01 < 0.05 dan nilai thitung 2.791 > ttabel 2.201. Dengan demikian, variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, H_o ditolak dan H_1 diterima.

b) Model 2

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda Model II

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	48.58047	9.960707	4.877211	0.0005
X1	2.01E-05	4.82E-06	4.170866	0.0016
X2	0.308043	0.477308	0.645375	0.5319
Z	1.244208	1.017777	1.222476	0.2471

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Y = 48.58047 + 2.01E-05X1 + 0.308043X2 + 1.244208Z + e

Berdasarkan hasil regresi linear berganda tabel adapun model persamaan regresi yang diperoleh dan dibentuk sebagai berikut:

- Nilai Konstanta 48.58047 menunjukkan bahwa apabila variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) dan tingkat pengangguran (X2) berada dalam kondisi tetap (konstan), maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) diperkirakan sebesar 48.58047.
- Nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) sebesar 2.01 yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara PDRB dan IPM. Hal ini berarti setiap peningkatan pada PDRB akan berdampak pada peningkatan IPM sebesar 2.01.
- Nilai koefisien variabel Tingkat Pengangguran (X2) sebesar 0.30 menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran dan IPM. Hal ini berarti setiap peningkatan pada tingkat pengangguran akan berdampak pada peningkatan IPM sebesar 0.30.

- Nilai koefisien variabel kemiskinan (Z) sebesar 1.24 menunjukkan adanya hubungan positif antara kemiskinan dan IPM. Hal ini berarti setiap peningkatan pada tingkat kemiskinan akan berdampak pada peningkatan IPM sebesar 1.24.

i) Koefisien Determinasi (R2)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 rendah atau mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang sangat terbatas dalam menerangkan perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu, artinya variabel independen mampu memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model II

R-squared	**0.681600**
Adjustes R-squared	0.565819

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) dalam Tabel 10 memperlihatkan nilai R-squared sebesar 0.681600 (68.16%). Hal ini menunjukkan bahwa 68.16% variasi dalam variabel IPM dapat dijelaskan oleh variabel PDRB dan Tingkat Pengangguran, sisanya 31.84% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

ii) Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel PDRB dan Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Jika nilai Sig. < 0,05, berarti hipotesis diterima. Sebaliknya, jika Sig. > 0,05, hipotesis ditolak.

Tabel 11. Hasil UJi Simultan (Uji f) Model II

F-statistic	**5.886942**
Prob(F-Statistic)	0.008769

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 11, hasil Uji Simultan (Uji F) menunjukkan nilai 0,008 < 0,05, yang berarti variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

iii) Uji Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *prob-t statistik* dengan tingkat signifikansi (α = 0,05). Jika nilai signifikansi suatu variabel > 0,05, berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.

Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji t) Model II

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	48.58047	9.960707	4.877211	0.0005
X1	2.01E-05	4.82E-06	4.170866	0.0016
X2	0.308043	0.477308	0.645375	0.5319
Z	1.244208	1.017777	1.222476	0.2471

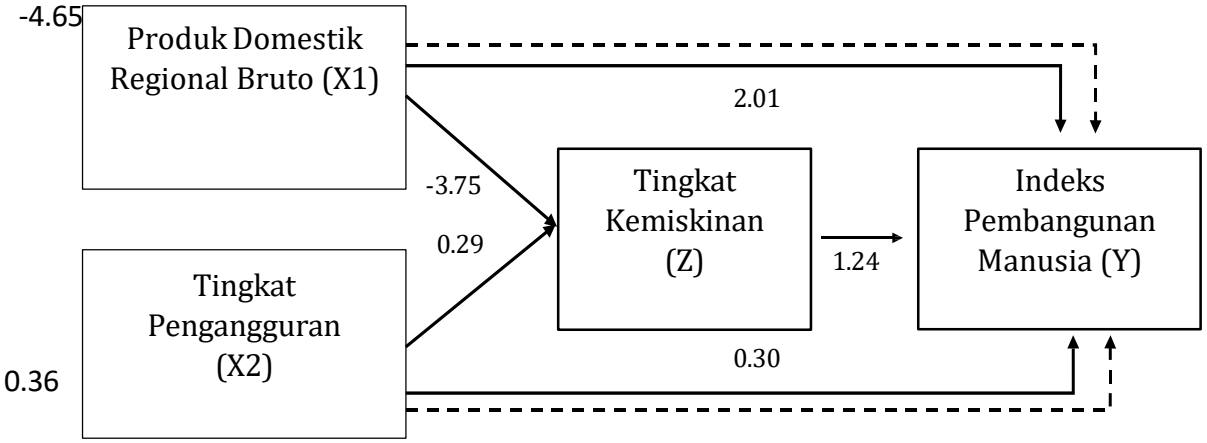
Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa variabel PDRB (X1) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.001 > 0.05 dan nilai t_{hitung} 4.170 < t_{tabel} 2.201. Dengan demikian, variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya, H_o ditolak dan H_1 diterima. Sementara itu, Pengangguran (X2) juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.531 > 0.05 dan nilai t_{hitung} 2.791 > t_{tabel} 2.201. Dengan

demikian, variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya, H_o diterima dan H_1 ditolak. Sedangkan, variabel Kemiskinan
(Z) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.247 > 0.05 dengan nilai t_{hitung} 1.222 < t_{tabel} 2.201. Dengan demikian, variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya, H_o diterima dan H_1 ditolak.

3. Uji Analisis Jalur

Path analysis adalah metode yang digunakan untuk meneliti hubungan kausal antara variabel-variabel dalam suatu model. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menilai tingkat signifikansi hubungan antar variabel serta menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat.



Gambar 1. Model Struktural Path Analysis

= Pengaruh Langsung
= Pengaruh Tidak Langsung

a) Pengaruh Langsung
- Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X1) memiliki pengaruh langsung negatif terhadap kemiskinan (Z) sebesar -3.75.
- Pengaruh Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh langsung positif terhadap Kemiskinan (Z) sebesar 0.29.
- Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X1) memiliki pengaruh langsung positif terhadap IPM (Y) sebesar 2.01.
- Pengaruh Tingkat Pengangguran (X2) memiliki pengaruh langsung positif terhadap IPM (Y) sebesar 0.30.
- Pengaruh Tingkat Kemiskinan (Z) memiliki pengaruh langsung positif terhadap IPM (Y) sebesar 1.24.

b) Pengaruh Tidak Langsung
- Produk Domestik Regional Bruto (X1) memberikan pengaruh tidak langsung negatif terhadap IPM (Y) melalui kemiskinan (Z) sebesar -4.65.
- Tingkat Pengangguran (X2) memberikan pengaruh tidak langsung positif terhadap IPM (Y) melalui Kemiskinan (Z) sebesar 0.36.

c) Total Pengaruh
- Total pengaruh langsung dan tidak langsung variabel PDRB (X1) terhadap IPM (Y) sebesar -2.64.
- Total pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Tingkat Pengangguran (X2) terhadap IPM (Y) sebesar 0.66.

Tabel 13. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)

Pengaruh Antar Variabel	Pengaruh Langsung	Tingkat Signifikansi	Hubungan	Pengaruh Tidak Langsung	Hubungan	Total Pengaruh
X1 -> Z	-3.75	0.0007	Signifikan	-	-	-3.75
X2 -> Z	0.29	0.0163	Signifikan	-	-	0.29
X1 -> Y	2.01	0.0016	Signifikan	-4.65	Tidak Signifikan	-2.64
X2 -> Y	0.30	0.5319	Tidak Signifikan	0.36	Tidak Signifikan	0.66
Z -> Y	1.24	0.2471	Tidak Signifikan	-	-	1.24

Sumber: *Output Eviews 12 data diolah, 2025*

B. Pembahasan

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki t-Statistic sebesar -4.494 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Artinya, ketika PDRB mengalami kenaikan, maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Temuan ini sejalan dengan Teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (dalam Hartanto *et al.*, 2021), dijelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kegiatan ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa, serta perputaran pendapatan yang lebih besar di masyarakat. Di Sulawesi Selatan, sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi menjadi penyumbang utama PDRB. Ketika sektor-sektor ini tumbuh, terbuka lebih banyak lapangan kerja dan sumber penghasilan baru, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan meningkatnya peluang kerja dan pendapatan, daya beli masyarakat meningkat dan angka kemiskinan bisa ditekan. Hal ini juga sejalan dengan temuan Mandey *et al.*, (2023) ; Wiryawan & Pratiwi (2024), menjelaskan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, berbandinga terbalik dengan temuan Arifin & Hendriyani (2022), menunjukkan bahwa PDRB justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki kesempatan untuk

bekerja atau tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Keadaan ini berdampak langsung pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena individu yang tidak bekerja cenderung kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seseorang tidak memiliki sumber penghasilan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun menurun, yang pada akhirnya dapat mendorongnya masuk dalam kondisi kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki t-Statistic sebesar 2.791 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.01 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Artinya, Kenaikan angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan, mengingat pengangguran termasuk salah satu faktor dominan yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi klasik dan pembangunan (dalam Zainul Bahri 2023) yang menekankan pentingnya peran pekerjaan dalam mengentaskan kemiskinan. Ketika seseorang kehilangan atau tidak memiliki pekerjaan, maka kemampuan untuk menghasilkan

pendapatan akan menurun, yang pada akhirnya akan berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengangguran yang dibiarkan tinggi tanpa intervensi akan memperluas kesenjangan ekonomi dan memperkuat struktur kemiskinan. Hal ini diperparah dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sulawesi Selatan. Banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan, dan kurungnya instrastruktur yang memadai. Sektor pertanian dan perikanan yang banyak menyerap tenaga kerja di pedesaan juga belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan pendapatan yang stabil dan layak. Akibatnya, masyarakat rentan mengalami transisi dari kelompok hampir miskin menjadi kelompok miskin ketika terjadi guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau bencana alam. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Ayuningsasi (2021) bahwa tingkat pengangguran terbukti berpengaruh signifikan dan berbanding lurus dengan kemiskinan, mengindikasikan hubungan erat antara kedua variabel tersebut. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Utami *et al., (*2022), menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa PDRB memiliki t-Statistic sebesar 4.170 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan. Artinya, ketika PDRB mengalami peningkatan, maka semakin baik pula capaian pembanguna manusianya. Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen Romer (1990), yang menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang. Ketika PDRB meningkat, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai sektor-sektor publik yang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Hal ini sejalan dengan komponen utama IPM yang mencakup pendidikan, harapan hidup, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan PDRB tidak hanya mencerminkan kemajuan ekonomi tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat dimensi pembangunan manusia. Selain itu, temuan ini selaras dengan hasil penelitian oleh Todaro dan Smith (2012) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berdampak pada kesejahteraan apabila didistribusikan secara merata dan mendukung sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di Sulawesi Selatan, peningkatan PDRB yang bersumber dari sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, dan jasa dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Jika pendapatan meningkat, masyarakat lebih mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap IPM. Penelitian ini sejalan dengan temuan Nurfauziah (2021), menyatakan bahwa peningkatan PDRB dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci dalam pembangunan manusia karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pendapatan. Semakin baik kinerja ekonomi suatu wilayah, semakin tinggi pula kualitas pembangunan manusianya melalui peningkatan kapasitas produktif dan inovasi masyarakat. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021), menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM.

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan

Menurut Todaro (2000), menyatakan bahwa esensi pembangunan terletak pada pembangunan manusia. Proses ini mendukung keberhasilan suatu negara dalam menguasai teknologi modern, meningkatkan keterampilan kerja, dan menekan angka pengangguran demi pembangunan berkelanjutan. Dengan mengatasi pengangguran, pembangunan manusia dapat ditingkatkan melalui perbaikan kualitas hidup seperti pemenuhan gizi, konsumsi rumah tangga, dan akses pendidikan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki t-Statistic sebesar 0.645 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.53 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa

Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan berpotensi meningkatkan IPM. Temuan ini sejalan dengan teori Capability Approach dari Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan manusia tidak semata-mata diukur dari pendapatan atau pekerjaan, tetapi lebih pada kemampuan individu dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan menjalani kehidupan yang produktif. Artinya, meskipun seseorang menganggur, jika akses terhadap pendidikan dan kesehatan tetap terjaga, maka nilai IPM tetap bisa meningkat.Maka, pengangguran bukan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi IPM di Sulawesi Selatan, sehingga dampaknya terbilang kecil. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021), mengemukakan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap IPM. dampak positif ini bersumber dari pengangguran friksional, di mana peningkatan tingkat pendidikan membuat seseorang cenderung menolak pekerjaan yang tidak sesuai dan memilih menganggur sementara sembari mencari pekerjaan yang sepadan dengan kualifikasi pendidikannya. Namun, berbeda dengan temuan oleh Nurinsana (2022), menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM. Pengangguran memberikan dampak yang relatif kecil terhadap IPM, dimana ketidaksesuaian antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja menghambat peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

5. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan

Perubahan paradigma pembangunan dari dominasi negara menuju pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai selama angka kemiskinan masih tinggi. Realitas ini muncul karena mayoritas penduduk miskin cenderung memfokuskan seluruh energi dan waktunya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam aktivitas di luar upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Berbagai temuan penelitian membuktikan bahwa tingginya proporsi penduduk miskin justru menghambat kemajuan pembangunan manusia, utamanya disebabkan oleh lemahnya daya beli kelompok masyarakat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan memiliki t-Statistic sebesar 1.222 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.24 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka akan berpotensi meningkatkan IPM. Namun, pada penelitian ini tingkat kemiskinan bukan faktor utama yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif dalam menyediakan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Contohnya seperti program beasiswa (beasiswa pemprov sulsel), BPJS Kesehatan, serta pembangunan Infrastruktur di daerah terpencil. Dengan demikian, meskipun angka kemiskinan masih tinggi, dampaknya terhadap indikator IPM bisa ditekan atau diminimalkan melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Temuan ini juga sejalan dengan pemikiran Sen (1999), mengemukakan bahwa pembangunan manusia tidak semata ditentukan oleh kondisi ekonomi (seperti tingkat kemiskinan), melainkan oleh perluasan kebebasan dan akses terhadap kesempatan dasar. Dalam hal ini, meskipun masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, jika tetap memiliki akses pada pendidikan dan layanan kesehatan, maka kualitas hidup masih bisa ditingkatkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani *et al.*, (2024), menyatakan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti meskipun tingkat kemiskinan tinggi dapat membatasi kemampuan ekonomi individu, pemerintah daerah mungkin telah menjalankan program sosial yang menjaga agar warga miskin tetap memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, berbanding terbalik dengan temuan Trisno & Oktarina (2022), mengemukakan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Berarti, ketika kemiskinan mengalami penurunan, maka IPM akan mengalami peningkatan. Ketika individu terbebas dari kemiskinan, seluruh kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi secara memadai. Tidak hanya terjaminnya kebutuhan pangan, tetapi juga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi lebih terbuka. Dalam kondisi ini, masyarakat mampu melanjutkan pendidikan formal, memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas medis, serta menikmati sarana pendidikan, kesehatan,

sanitasi, dan air bersih yang layak. Pemenuhan berbagai kebutuhan pokok ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak positif terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

6. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi pengaruh tidak langsung PDRB terhadap IPM melalui kemiskinan sebesar -4.65 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05. Dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Temuan ini tidak sejalan dengan Teori trickle-down effect yang menjelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Meskipun PDRB meningkat, hasil dari pertumbuhan tersebut tidak secara otomatis mengalir ke kelompok masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif cenderung terkonsentrasi pada sektor formal atau wilayah tertentu, seperti kota-kota besar atau sektor industri dan perdagangan, sementara masyarakat miskin yang umumnya bekerja di sektor informal atau pedesaan tidak memperoleh manfaat yang signifikan. Akibatnya, angka kemiskinan tidak banyak berubah, dan peningkatan kesejahteraan yang diukur melalui IPM juga tidak tercapai secara merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021), menjelaskan secara tidak langsung PDRB tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan IPM. Peningkatan PDRB tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin atau peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Artinya, PDRB hanya mencerminkan nilai ekonomi secara makro, tetapi tidak menjamin adanya perbaikan kondisi hidup pada tingkat individu. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB bukan satu- satunya penentu IPM, terutama jika pengaruhnya terhadap kemiskinan sebagai variabel perantara lemah atau tidak signifikan. Namun, berbanding terbalik dengan temuan oleh Siagian *et al.*, (2024), menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Riau.

7. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi pengaruh tidak langsung Tingkat Pengangguran terhadap IPM melalui kemiskinan sebesar 0.36 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui kemiskinan di Sulawesi Selatan. Temuan ini berbanding terbalik dengan teori klasik pembangunan ekonomi oleh Todaro & Smith (2015), yang menyatakan bahwa pengangguran berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemiskinan. Menurut teori ini, pengangguran yang tinggi akan mengurangi pendapatan rumah tangga, membatasi akses pendidikan dan kesehatan, dan pada akhirnya menurunkan IPM. Hal ini disebabkan oleh peran sektor informal yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan, sehingga pendapatan masyarakat tetap terjaga meski tanpa pekerjaan formal. Selain itu, intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial dan perlindungan ekonomi mungkin telah mengurangi keterkaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Handayani & Woyanti (2021), menyatakan bahwa tingkat pengangguran secara tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Hal ini disebabkan karena adanya sektor informal dan dukungan jaringan sosial yang kuat. Sehingga, masyarakat dengan tingkat pengangguran tinggi dapat tetap bertahan melalui aktivitas ekonomi non-formal, seperti perdagangan kecil-kecilan, pertanian subsisten, atau bantuan keluarga. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian oleh Nurinsana (2022), yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran justru berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Kemiskinan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

Andhykha, R., Handayani, H.R. and Woyanti, N. (2018) 'Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah', *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2).

Arifin, N. and Hendriyani, Y. (2022) 'PDRB, IPM, dan kemiskinan di Indonesia', *Journal of Sharia Financial Management*, 3(2), pp. 87–103.

Baumann, F. (2021) 'The next frontier—human development and the anthropocene: UNDP human development report 2020', *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 63(3), pp. 34–40.

Darmawan, I.G. and Ayuningsasi, A.A.K. (2021) 'Pengaruh Tingkat Pengangguran, Konsumsi Rumah Tangga, Dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', *E-Jurnal EP Unud*, 10(12), pp. 4893–4921.

Darwin Lie, S.E. *et al.* (2022) *Indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi*. CV. Azka Pustaka.

Dwi Utami, N., Nurfalah, R. and Desmawan, D. (2022) 'Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2021', *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), pp. 162–175. doi:10.58192/ebismen.v1i3.74.

Handayani, S. and Woyanti, N. (2021) 'Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Modal Terhadap IPM DI 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun', *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 2(1), pp. 33–46. Available at: https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/biceser/article/view/242/194.

Hani, N.R. and Imaningsih, N. (2024) 'Analisis Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan', *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 7(2), pp. 80–88.

Hartanto, T., Zakaria, J. and Mapparenta (2021) 'Pengaruh Dana Desa, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Sulawesi Selatan', *Economics and Digital Business Review*, 8(1), pp. 573–587.